

## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP VARIABEL PENDAPATAN PERKAPITA DAN ANGKA KEMISKINAN SEBAGAI INDIKATOR KEMAKMURAN RAKYAT

IMAN AKHADI  
STIE Trisakti Jakarta  
[imn@tsm.ac.id](mailto:imn@tsm.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[31 03 2022]

Dinyatakan Diterima  
[28 04 2022]

### KATA KUNCI:

Angka Kemiskinan, Kemakmuran Rakyat, Pajak,  
Pendapatan Perkapita

### KLASIFIKASI JEL:

H210; H530

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Angka Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. Metode penelitian dilakukan melalui analisis regresi sederhana dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS dan APBN RI selama periode 2010-2020. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian melalui uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap Angka Kemiskinan serta berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel Belanja Transfer ke Daerah terbukti secara signifikan merupakan variabel mediasi sempurna (complete mediation), sedangkan variabel Program Anggaran Subsidi bukan merupakan variabel mediasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat berupa PDB Perkapita dan Angka Kemiskinan di Indonesia selama periode 2010-2020. Adapun variabel lainnya tidak dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemerataan Pembangunan, dll. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pajak dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sekaligus untuk membuktikan pengertian pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.*

### ABSTRACT

*The aim of the research is to examine the Effect of Realized Tax Revenue on Poverty Rates and Per capita Income as an Indicator of People's Prosperity. The research method was carried out through simple regression analysis using data sourced from BPS and the Indonesian National Budget for the 2010-2020 period. The results showed that the realization of tax revenues had a significant negative effect on the poverty rate and a significant positive effect on per capita income. The variable of Expenditure Transfers to the Regions was proven to be significantly a complete mediation variable, while the Subsidized Budget Program variable was not a mediating variable. The limitations of this study are indicators for measuring people's prosperity in the form of GDP Per capita and Poverty Rates in Indonesia during the 2010-2020 period. Other variables are not used as indicators to measure people's prosperity, for example the Human Development Index (HDI), the Development Equity Index, etc. Through this research, it is hoped that the taxpayers will increasingly understand the importance of taxes in order to increase the prosperity of the people. This is at the same time to prove the meaning of tax as a means to increase people's prosperity.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak yang dilakukan negara kepada rakyat pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan salah satu azas dalam pemungutan pajak menurut W.J. Langen yaitu azas kesejahteraan, dimana pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2018). Pengertian Pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, salah satu indikator yang digunakan adalah mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat dengan menghitung seberapa besar nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita atau pendapatan perkapita suatu negara. Menurut (Malik, 2018), PDB oleh sebagian ekonom dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dengan argumentasi bahwa PDB perkapita merefleksikan rata-rata pendapatan dan pengeluaran seseorang. Semakin tinggi angka PDB Perkapita akan diikuti dengan pengeluaran yang tinggi pula. Indikator utama yang digunakan disini adalah harga. Walaupun demikian, pendekatan PDB merupakan pendekatan yang abstrak dan tidak menggambarkan pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan yang sederhana ini mengabaikan banyak faktor seperti nilai, lingkungan, kondisi emosional dan psikologi masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2020, PDB per kapita Indonesia diketahui sebesar US\$ 3.911,7 atau setara dengan Rp 56,9 juta. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 59,065 juta (Badan Pusat Statistik, 2020b).

Selain indikator pendapatan perkapita sebagai alat ukur kemakmuran suatu negara, faktor kemiskinan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat (Badan Pusat Statistik, 2020a). Meskipun pendapatan perkapita menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi persoalan di Negara Indonesia. Berdasarkan data BPS pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 26,42 juta orang atau sebesar 9,78% dari total penduduk sebanyak 270 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,37% jika dibandingkan dengan periode September 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020b).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi atau menurunkan tingkat kemiskinan adalah melalui program Anggaran Subsidi yang dialokasikan dalam Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data APBN 2019, Anggaran Subsidi ditetapkan sebesar Rp 224,3 Trilyun

yang meliputi Susidi Energi sebesar 160 Trilyun dan Subsidi Non Energi sebesar 64,3 Trilyun. Selain Anggaran Subsidi, Pemerintah dalam APBN juga mengalokasikan program Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antar daerah. Dalam APBN 2019, Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp 814,4 Trilyun Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meningkat 7,4% jika dibandingkan APBN 2018 sebesar Rp 757,8 Trilyun (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam APBN, sumber utama dalam pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, dimana dalam APBN 2019 penerimaan perpajakan menyumbangkan 79% (1.546,1 T) dari total realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.957,2 T. Tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan, akan sangat berpengaruh terhadap realisasi belanja negara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Penelitian tentang pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya oleh (Saragih, 2018) yang menyatakan pertumbuhan , ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah. Hasil yang sama dilakukan oleh (Adkisson & Mohammed, 2014) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain tentang hubungan Pajak dengan Kemakmuran Rakyat dilakukan oleh (Vatavu et al., 2019) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan (welfare) penduduk sebuah negara. Lisna et al., (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerimaan pajak terhadap angka kemiskinan dan pendapatan perkapita dengan menggunakan variabel Belanja Transfer ke Daerah dan variabel Anggaran Subsidi sebagai variabel mediasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data selama periode 2010 sampai 2020.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2007). Pajak yang dibayar oleh wajib pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh rakyat kepada negara, dimana hasil dari pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pengeluaran pembiayaan pembangunan. Melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat secara luas dan merata. Hal inilah menjadi esensi dari tujuan pemungutan pajak, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak yang dipungut oleh negara berdasarkan Lembaga Pemungutnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (P3). Disamping pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, terdapat juga pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan APBD masing-masing daerah. (Mardiasmo, 2018)

## **2.2 Kemakmuran rakyat**

Kemakmuran menurut KBBI didefinisikan sebagai keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan ruhani akibat terpenuhi kebutuhannya (KBBI, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, kemakmuran rakyat di suatu negara akan terwujud apabila kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi dengan mudah, serta dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tertier. Meskipun demikian untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan hidup, terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kemakmuran rakyat diantaranya faktor sosial, kondisi psikologis masyarakat dan lingkungan (Malik, 2018). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur Kemakmuran Rakyat adalah variabel Pendapatan Perkapita dan variabel Angka Kemiskinan di Indonesia.

### **a. Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita atau bisa juga disebut PDB Perkapita adalah jumlah nilai PDB yang merupakan jumlah atas produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk. Nilai PDB Perkapita digunakan untuk mengukur pengeluaran per orang dalam suatu negara (FAHMI, 2018).

Dalam perspektif makro ekonomi, Mankiw (2007: 536-537) menyatakan bahwa, "Dalam jangka panjang, kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya." Mankiw menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan

ekonomi terbaik adalah PDB. PDB riil mengukur output barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki hampir segalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil, lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet. (Saputra; Bambang & Mahmudi, 2012)

### **b. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2020b). Permasalahan kemiskinan memang tidak mudah untuk diatasi, karena kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Negara dengan tingkat kemiskinan yang rendah, menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Sebaliknya jika tingkat kemiskinan tinggi, maka tingkat kemakmuran di negara tersebut rendah.

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan angka Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. (Badan Pusat Statistik, 2020b) Pada bulan September 2020, nilai GK penduduk Indonesia tercatat sebesar Rp 458.987/kapita/bulan. Jumlah Penduduk Indonesia kategori miskin sampai bulan September 2020 tercatat sebesar 27,55 juta orang (10,19%) meningkat sebesar 2,76 juta jiwa (0,97%) terhadap September 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2020b).

## **2.3 Program Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun dalam APBN melakukan Program Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Kegiatan Belanja Transfer ke Daerah ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan publik, akselerasi daya saing dan mendorong belanja yang produktif.

Sesuai dengan UU No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sejak tahun 2015 Pemerintah Pusat selain melakukan Program Transfer ke Daerah juga memberikan Dana Desa yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaa masyarakat (Kemenkeu, 2015).

#### **2.4 Program Anggaran Subsidi**

Kebijakan Anggaran Subsidi dalam APBN pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi (Saparini, 2010). Alokasi belanja subsidi dikelompokkan menjadi dua yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM dan Listrik, sedangkan subsidi non-energi antara lain subsidi pupuk, pajak, bunga, pangan, dll.

Pemerintah Pusat secara bertahap mengurangi Anggaran Subsidi, terutama Subsidi Energi untuk dialihkan pada program yang lebih produktif. Kebijakan radikal terhadap Subsidi Energi dilakukan oleh Pemerintah dengan menghapus subsidi premium serta menjalankan mekanisme subsidi tetap solar per Januari 2015 (Kemenkeu, 2015).

Untuk tahun 2020, pemerintah memberikan Subsidi Energi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pengendalian dan pengawasan. (Kementerian Keuangan RI, 2020)

#### **2.5 Perumusan Hipotesis**

##### **2.5.1 Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) Terhadap Angka Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita**

Realiasi Penerimaan Pajak (RPP) merupakan pencapaian penerimaan perpajakan yang dilaporkan dalam APBN pada setiap akhir tahun fiskal. Besarnya RPP setiap tahun sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global. Hasil dari penerimaan perpajakan, sesuai dengan amanat UU digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja negara yang dialokasikan menurut fungsinya, diantaranya untuk Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Kesehatan, dll.

Penelitian tentang hubungan Pajak dengan Kemakmuran Rakyat dilakukan oleh (Vatavu et al., 2019) yang menunjukkan bahwa Penerimaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan (welfare) penduduk sebuah negara. Lisna et al., (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil mempercepat pengentasan kemiskinan. Indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran rakyat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan. Rakyat suatu negara dikatakan semakin sejahtera/makmur apabila Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan dan pada periode yang sama Angka Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, Hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh positif Terhadap Pendapatan Perkapita (PDBP) dan berpengaruh negatif terhadap Angka Kemiskinan (AKM)

##### **2.5.2 Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) Terhadap Program Belanja Transfer ke Daerah (BTD)**

Pajak yang telah berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan. Salah satu bentuk pembiayaan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah dalam RAPBN adalah melalui Program Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus serta Dana Desa. Penentuan besarnya Belanja Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Pusat dilakukan berdasarkan Formula (perhitungan yang didasarkan atas data dasar sebagai sumber melakukan perhitungan alokasi dana transfer ke daerah), Daerah Penghasil (perhitungan yang didasarkan atas data sumber daya alam yang memberikan penghasilan bagi negara) dan Kinerja (perhitungan didasarkan atas laporan kinerja masing-masing daerah). Selain itu ada beberapa daerah yang menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat karena adanya amanat UU tentang Otonomi Khusus, antara lain Provinsi DI Aceh, Provinsi Papua/Papua Barat dan Provinsi DI Jogjakarta (Sofi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, Hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh positif Terhadap Program Belanja Transfer ke Daerah

##### **2.5.3 Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) Terhadap Program Anggaran Subsidi (PAS)**

Program Anggaran Subsidi dalam APBN dikelompokkan menjadi dua, yaitu Subsidi Energi dan Subsidi Non-Energi. Subsidi Energi terdiri dari subsidi BBM dan Listrik, sedangkan Subsidi Non-Energi terdiri dari subsidi pupuk, pajak, bunga, pangan, benih, dll. (Saparini, 2010) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Pusat tergantung dari tujuan pemberian subsidi dan ketersediaan anggaran dalam APBN. Tujuan pemberian subsidi pada dasarnya untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi. Pemerintah mulai mengurangi besaran anggaran subsidi terutama subsidi yang tidak tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. (Kemenkeu, 2015)

Berdasarkan uraian tersebut, Hipotesis yang diajukan adalah :

H3: Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) berpengaruh positif Terhadap Program Anggaran Subsidi (PAS)

##### **2.5.4 Pengaruh Belanja Transfer ke Daerah (BTD) Terhadap Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan**

Program Belanja Transfer ke Daerah merupakan bagian dari anggaran belanja dalam APBN sebagai salah satu pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari Program Belanja Transfer ke Daerah adalah untuk memberikan peningkatan pembangunan bagi daerah

serta memberikan penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah (Wardhana. et all, 2013). Melalui Dana Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja di daerah (APBD). Melalui program belanja di daerah yang tepat sasaran, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di daerah serta mengurangi disparitas ekonomi antar daerah. Menurut Nazara (2010), disparitas antar daerah merupakan masalah struktural di perekonomian Indonesia. Penelitian tentang hubungan Dana Bagi Hasil sebagai bagian dari Transfer ke Daerah terhadap pengentasan kemiskinan dilakukan oleh (Lisna et al., 2013) yang menunjukkan bahwa besarnya pajak daerah dan dana bagi hasil mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Hipotesis yang diajukan adalah :

H4 :Program Belanja Transfer ke Daerah (BTD) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita (PDBP) dan berpengaruh negatif terhadap Angka Kemiskinan (AKM)

#### 2.5.5 Pengaruh Program Anggaran Subsidi (PAS) Terhadap Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan

Program Anggaran Subsidi merupakan pos belanja dalam APBN yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran rakyat dan daya saing ekonomi (Saparini, 2010). Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah selalu dievaluasi setiap tahun agar program subsidi lebih tepat sasaran. Program Anggaran Subsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin melalui program Bantuan Sosial (Bansos).

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Maryati diperoleh kesimpulan bahwa Pajak, Subsidi dan ZIS tidak signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. (Ramadhan & Mariyanti, 2013)

Berdasarkan uraian tersebut, Hipotesis yang diajukan adalah :

H5: Program Anggaran Subsidi (PAS) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita (PDBP) dan berpengaruh negatif terhadap Angka Kemiskinan (AKM)

#### 2.5.6 Peran Mediasi Belanja Transfer Daerah Dalam Hubungan antara Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan

Belanja Transfer ke Daerah sebagai bagian dari program belanja dalam APBN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah serta menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah (Wardhana et al., 2013). Potensi sumber daya alam setiap daerah yang berbeda-beda, menimbulkan dampak adanya potensi daerah kaya dan daerah

miskin. Untuk mengurangi timbulnya disparitas pendapatan antar daerah tersebut, Pemerintah Pusat memberikan Dana Bantuan berupa Belanja Transfer ke Daerah. Peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia sebagai negara desentralisasi fiskal. (Ministry of Finance, 2016)

Berdasarkan uraian tersebut, Hipotesis yang diajukan adalah :

H6 : Belanja Transfer ke Daerah memediasi hubungan antara Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan

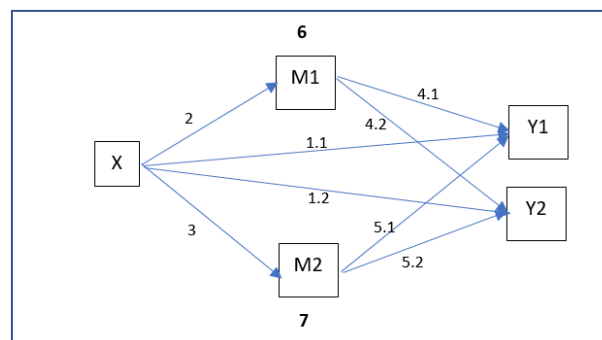
#### 2.5.7 Peran Mediasi Program Anggaran Subsidi Dalam Hubungan antara Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan

Anggaran Subsidi dari Pemerintah Pusat diberikan sebagai dana bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, baik bantuan berupa dana tunai (BLT), bantuan bahan makanan pokok (Bantuan Sosial), subsidi bunga, subsidi pupuk, subsidi harga BBM, dll. Subsidi tersebut pada dasarnya diberikan untuk mengurangi dampak sosial yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah ataupun akibat dari kondisi krisis ekonomi seperti dampak dari Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai saat ini. Tujuan utama dari kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap mendapatkan akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. (Budiantoro, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, Hipotesis yang diajukan adalah :

H7 : Program Anggaran Subsidi (PAS) memediasi hubungan antara Penerimaan Pajak (RPP) Terhadap Pendapatan Perkapita (PDBP) dan Angka Kemiskinan (AKM)

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.  
Model Penelitian

Dimana :

X = Variabel Independen (Realisasi Penerimaan Pajak)

Y1 = Variabel Dependen (Pendapatan Perkapita)

Y2 = Variabel Dependen (Angka Kemiskinan)

M1 = Variabel Mediasi (Belanja Transfer ke Daerah)

M2 = Variabel Mediasi (Program Anggaran Subsidi)

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk meneliti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menguji peranan variabel mediasi, digunakan metode perbedaan koefisien. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.1  $PDBP = \alpha_1 + \beta_1 RPP + \epsilon$  (Model Langsung)

1.2  $AKM = \alpha_1 + \beta_1 RPP + \epsilon$  (Model Langsung)

2  $BTD = \alpha_2 + \beta_2 RPP + \epsilon$  (Model Langsung)

3  $PAS = \alpha_3 + \beta_3 RPP + \epsilon$  (Model Langsung)

4.1  $PDBP = \alpha_4 + \beta_4 BTD + \epsilon$  (Model Langsung)

4.2  $AKM = \alpha_4 + \beta_4 BTD + \epsilon$  (Model Langsung)

5.1  $PDBP = \alpha_5 + \beta_5 PAS + \epsilon$  (Model Langsung)

5.2  $AKM = \alpha_5 + \beta_5 PAS + \epsilon$  (Model Langsung)

6.1  $PDBP = \alpha_6 + \beta_6 RPP + \beta_6 BTD + \epsilon$  (Model Mediasi)

6.2  $AKM = \alpha_6 + \beta_6 RPP + \beta_6 BTD + \epsilon$  (Model Mediasi)

7.1  $PDBP = \alpha_7 + \beta_7 RPP + \beta_7 PAS + \epsilon$  (Model Mediasi)

7.2  $AKM = \alpha_7 + \beta_7 RPP + \beta_7 PAS + \epsilon$  (Model Mediasi)

Variabel *independen*/bebas dalam penelitian ini adalah Realisasi Penerimaan Pajak (RPP), sedangkan variabel *dependen*/terikat adalah Pendapatan Perkapita (PDBP) dan Angka Kemiskinan (AKM) sebagai indikator kemakmuran rakyat . Kemakmuran suatu negara dikatakan semakin meningkat apabila dalam satu tahun fiskal terdapat kenaikan PDBP dan penurunan AKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Variabel mediasi dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Belanja Transfer ke Daerah (BTD) dan Program Anggaran Subsidi (PAS) sebagai mediator antara Realisasi Penerimaan Pajak dengan Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan.

#### Uji Variabel Mediasi

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah variabel mediasi mampu memediasi variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan metode perbedaan koefisien. Metode perbedaan koefisien dilakukan melalui pemeriksaan dengan menggunakan dua analisis, yaitu analisis dengan melibatkan variabel mediasi dan analisis tanpa melibatkan variabel mediasi.

Pengujian terhadap variabel mediasi dengan metode perbedaan koefisien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

(1) Memeriksa pengaruh langsung antara variabel independen (RPP) terhadap variabel dependen (PDBP dan AKM) pada model yang melibatkan variabel mediasi. Analisis dilakukan dengan melihat pengaruh variabel RPP terhadap variabel Pendapatan Perkapita

(PDBP) serta pengaruh variabel RPP terhadap variabel Angka Kemiskinan (AKM)) dengan melibatkan variabel mediasi berupa variabel Belanja Transfer ke Daerah (BTD) dan Program Anggaran Subsidi (PAS).

(2) Memeriksa pengaruh langsung antara variabel independen (RPP) terhadap variabel dependen (PDBP dan AKM) tanpa melibatkan variabel mediasi.

(3) Memeriksa pengaruh langsung antara variabel indenden (RPP) terhadap variabel mediasi berupa variabel BTD dan variabel PAS.

(4) Memeriksa pengaruh langsung antara variabel mediasi berupa variabel BTD dan variabel PAS terhadap variabel dependen (PDBP dan AKM).

Apabila hasil dari pemeriksaan diketahui bahwa hasil pengujian (3) dan (4) signifikan, sedangkan pengujian (1) tidak signifikan, maka dapat disimpulkan variabel mediasi merupakan mediasi sempurna (*complete mediation*). Jika hasil pengujian (3) dan (4) signifikan, sedangkan pengujian (1) juga signifikan, dimana koefisien hasil pengujian (1) lebih kecil dari hasil pengujian (2), maka dapat disimpulkan variabel mediasi merupakan mediasi sebagian (*partial mediation*). Jika salah satu dari pengujian (3) atau (4) tidak signifikan, maka dapat disimpulkan variabel mediasi tidak memediasi variabel independen terhadap variabel dependen (Solimun & Fernandes, 2017).

### 4. HASIL PENELITIAN

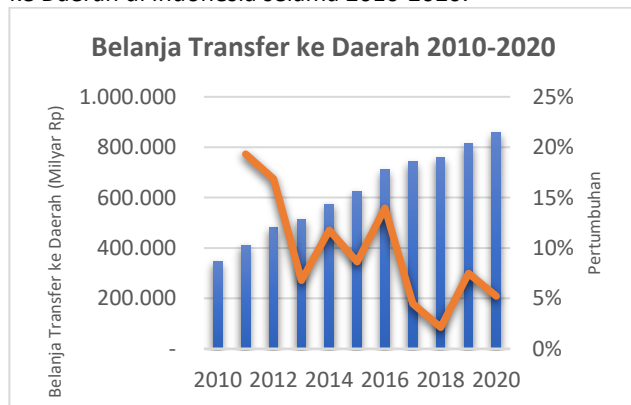
#### 4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak selama periode 2010-2020, pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dicapai pada tahun 2011 (Rp 873,874 Trilyun), naik sebesar 20,8% dibandingkan penerimaan pajak tahun 2010 (Rp 703,307 Trilyun). Realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai nilai lebih dari Rp 1.000 Trilyun terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.077,307 Trilyun. Pencapaian penerimaan pajak lebih dari Rp 1.000 belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar -9,2% dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penerimaan pajak turun menjadi Rp 1.404,508 Trilyun. Berikut grafik Realisasi Penerimaan Pajak dan pertumbuhannya selama periode 2010-2020.



**Gambar 2**  
**Grafik Penerimaan Pajak 2010-2020**  
Sumber : BPS, 2020

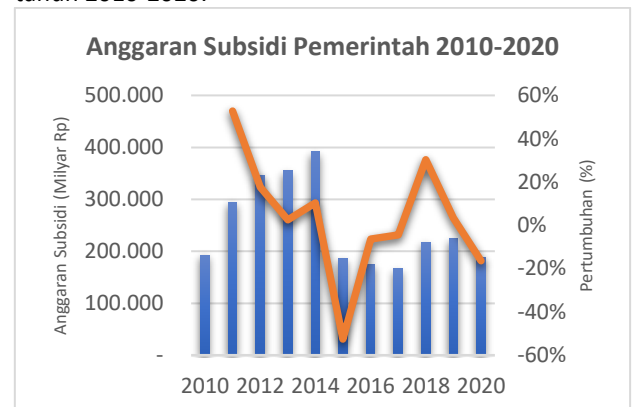
Anggaran Belanja Transfer ke Daerah selama 2010-2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 (Rp 411,325 Trilyun) naik sebesar 19,3% dibandingkan dengan tahun 2010 (Rp 344,728 Trilyun). Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 (Rp 757,793 Trilyun) yang hanya meningkat sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun 2017 (Rp 741,992 Trilyun). Komponen dalam Belanja Transfer ke Daerah mengalami perubahan pada tahun 2015 dengan dimasukkannya Program Dana Desa ke dalam Anggaran Belanja Transfer ke Daerah. Program Dana Desa merupakan program bantuan yang disalurkan ke setiap desa sebagai tuntutan para Kepala Desa di Indonesia untuk diberikan dana khusus untuk dikelola oleh Pemerintah Desa. Berikut grafik Belanja Transfer ke Daerah di Indonesia selama 2010-2020.



**Gambar 3**  
**Anggaran Belanja Transfer ke Daerah 2010-2020**  
Sumber : BPS, 2020

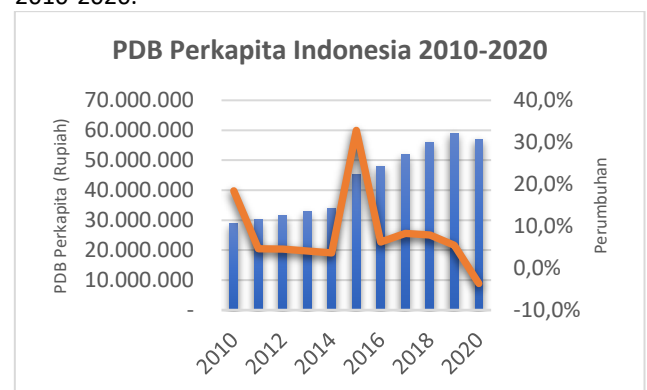
Program Anggaran Subsidi dalam APBN selama periode 2010-2020 mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun politik dalam negeri. Peningkatan subsidi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp 294,4 Trilyun, naik sebesar 52,8% dibandingkan dengan Anggaran Subsidi tahun 2010 sebesar Rp 192,7 Trilyun. Sedangkan penurunan subsidi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 186 Trilyun yang mengalami penurunan sebesar 52,6% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 392 Trilyun. Penurunan Anggaran Subsidi

oleh Pemerintah secara radikal terjadi karena Pemerintah menghapus subsidi BBM yang menyebabkan harga BBM tidak lagi disubsidi kecuali jenis Premium. Berikut grafik Anggaran Subsidi selama tahun 2010-2020.



**Gambar 4**  
**Anggaran Subsidi Pemerintah Tahun 2010-2020**  
Sumber : BPS, 2020

Pendapatan Perkapita atau PDB Perkapita sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran rakyat, sejak tahun 2010 cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita dipengaruhi oleh angka PDB secara nasional dan jumlah penduduk dalam satu tahun. Pendapatan Perkapita tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar Rp 59.065.340, naik sebesar 5,5% dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun pada tahun 2020, PDB Perkapita mengalami penurunan sebesar 3,7% menjadi Rp 56.900.000 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Adapun angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 (Rp 45.119.610), dimana Pendapatan Perkapita naik sebesar 32,8% dibandingkan dengan tahun 2014 (Rp 33.965.400). Berikut grafik Pendapatan Perkapita Indonesia selama 2010-2020.



**Gambar 5**  
**Pendapatan/PDB Perkapita Indonesia 2010-2020**  
Sumber : BPS, 2020

Jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2010-2020 cenderung mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah nominal maupun dari sisi prosentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin terbanyak secara

|     |                                                                                                                                        | R     | R <sup>2</sup> | Adj.<br>R <sup>2</sup> | F       | t     |                 |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------|---------|-------|-----------------|----------------|
|     | Model Regresi                                                                                                                          |       |                |                        | Value   | Sig.  | Value           | Sig.           |
| I   | Hubungan Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan perkapita dan Angka Kemiskinan                                                 |       |                |                        |         |       |                 |                |
| 1.1 | PDBP = -7956,532 + 4,274E-8 RPP + ε                                                                                                    | 0,945 | 0,893          | 0,881                  | 75,357  | 0,000 | 8,681           | 0,000          |
| 1.2 | AKM = 0,164 - 4,556E-14 RPP + ε                                                                                                        | 0,985 | 0,970          | 0,967                  | 291,505 | 0,000 | -17,074         | 0,000          |
| II  | Hubungan Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Belanja Transfer Ke Daerah                                                                |       |                |                        |         |       |                 |                |
| 2   | BTD = -1,223E+11 + 0,622 RPP + ε                                                                                                       | 0,964 | 0,929          | 0,921                  | 117,550 | 0,000 | 10,842          | 0,000          |
| III | Hubungan Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Program Anggaran Subsidi                                                                  |       |                |                        |         |       |                 |                |
| 3   | PAS = 3,903E+11 - 0,119 RPP + ε                                                                                                        | 0,378 | 0,143          | 0,048                  | 1,500   | 0,252 | -1,225          | 0,252          |
| IV  | Hubungan Belanja Transfer ke Daerah Terhadap Pendapatan perkapitan dan Angka Kemiskinan                                                |       |                |                        |         |       |                 |                |
| 4.1 | PDBP = 1183,534 + 6,752E-8 BTD + ε                                                                                                     | 0,964 | 0,929          | 0,921                  | 117,161 | 0,000 | 10,824          | 0,000          |
| 4.2 | AKM = 0,152 - 6,762E-14 BTD + ε                                                                                                        | 0,943 | 0,890          | 0,878                  | 72,934  | 0,000 | -8,540          | 0,000          |
| V   | Hubungan Anggaran Subsidi Terhadap Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan                                                           |       |                |                        |         |       |                 |                |
| 5.1 | PDBP = 65663,017 - 9,077E-8 PAS + ε                                                                                                    | 0,630 | 0,397          | 0,330                  | 5,917   | 0,038 | -2,432          | 0,038          |
| 5.2 | AKM = 0,100 + 3,753E-5 PAS + ε                                                                                                         | 0,273 | 0,074          | -<br>0,029             | 0,723   | 0,417 | 0,850           | 0,417          |
| VI  | Hubungan Realisasi Penerimaan Terhadap Pendapatan perkapita dan Angka Kemiskinan dengan melibatkan variabel Belanja Transfer ke Daerah |       |                |                        |         |       |                 |                |
| 6.1 | PDBP = -1602,666 + 1,041E-8 RPP + 5,196E-8 BTD + ε                                                                                     | 0,966 | 0,932          | 0,916                  | 55,202  | 0,000 | 0,668<br>2,152  | 0,523<br>0,064 |
| 6.2 | AKM = 0,165 - 4,917E-14 RPP + 5,807E-15 BTD + ε                                                                                        | 0,985 | 0,971          | 0,963                  | 131,672 | 0,000 | -4,670<br>0,356 | 0,002<br>0,731 |
| VII | Hubungan Realisasi Penerimaan Terhadap Pendapatan perkapita dan Angka Kemiskinan dengan melibatkan variabel Program Anggaran Subsidi   |       |                |                        |         |       |                 |                |

|     |                                                                |       |       |       |         |       |                   |                |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------------------|----------------|
| 7.1 | $PDBP = 9930,751 + 3,370E^{-8}RPP - 4,583E^{-8}PAS + \epsilon$ | 0,990 | 0,980 | 0,975 | 195,822 | 0,000 | 15,269<br>-5,855  | 0,000<br>0,000 |
| 7.2 | $AKM = 0,171 - 4,769E^{-14}RPP - 1,800E^{-14}PAS + \epsilon$   | 0,991 | 0,983 | 0,979 | 228,778 | 0,000 | -20,596<br>-2,438 | 0,000<br>0,041 |

Model regresi I menguji hubungan antara variabel *independen* (RPP) terhadap variabel *dependen* (PDBP dan AKM) tanpa melibatkan variabel mediasi (BTD dan PAS). Indikator untuk menilai kemakmuran rakyat adalah variabel Pendapatan Perkapita (PDBP) dan variabel Angka Kemiskinan (AKM). Sehingga untuk menguji persamaan regresi pada Model I terdapat 2 model regresi yaitu (a)  $PDBP = \alpha_1 + \beta_1 RPP + \epsilon$  yang melibatkan variabel PDBP sebagai variabel *dependen* dan (b)  $AKM = \alpha_1 + \beta_1 RPP + \epsilon$  yang melibatkan variabel AKM sebagai variabel *dependen*.

Berdasarkan hasil uji statistik, terlihat nilai R menunjukkan angka sebesar 0,945 dan 0,985 yang artinya hubungan/pengaruh variabel RPP terhadap variabel PDBP dan AKM sangat kuat. Nilai  $R^2$  pada model regresi RPP terhadap PDBP sebesar 0,893 artinya variabel independen RPP memberikan pengaruh kontribusi sebesar 89,3% terhadap variabel PDBP, sementara sisanya 10,7% dipengaruhi oleh variabel diluar RPP. Pada model regresi RPP terhadap AKM, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) diketahui sebesar 0,970 yang berarti variabel RPP memberikan pengaruh kontribusi sebesar 97% terhadap variabel AKM sedangkan variabel selain RPP memberikan pengaruh hanya 3%.

Berdasarkan persamaan regresi RPP terhadap PDBP dapat dijelaskan bahwa variabel independen RPP memberikan pengaruh positif terhadap variabel dependen PDBP dengan koefisien sebesar  $4,274E^{-8}$ . Hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 100 Trilyun akan berdampak pada pertumbuhan PDB Perkapita sebesar Rp 4.274.000. Nilai signifikansi  $t = 0,000$  atau  $< 0,05$  pada uji  $t$  menunjukkan bahwa variabel RPP berpengaruh signifikan terhadap variabel PDBP.

Pada persamaan regresi RPP terhadap AKM dapat dijelaskan bahwa variabel independen RPP memberikan pengaruh negatif terhadap variabel AKM. Hal ini terlihat dari nilai koefisien variabel RPP sebesar  $-4,556E^{-14}$ , yang artinya jika terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 100 Trilyun akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan sebesar 4,556%. Nilai signifikansi  $t=0,000$  atau  $< 0,05$  pada uji  $t$  menunjukkan bahwa variabel RPP berpengaruh signifikan terhadap variabel AKM.

Hasil ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Lisna et al., 2013; Vatavu et al., 2019) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan penurunan kemiskinan. Kenaikan PDB per kapita dan penurunan angka kemiskinan merupakan indikator dari peningkatan kemakmuran rakyat.

Model regresi II menguji hubungan variabel *independen* Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) terhadap variabel mediasi Belanja Transfer ke Daerah

(BTD). Berdasarkan tabel hasil uji statistik, diketahui nilai R sebesar 0,964 yang berarti hubungan variabel RPP terhadap variabel BTD sangat kuat. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,929 artinya bahwa variabel independen RPP memberikan pengaruh kontribusi sebesar 92,9% pada variabel BTD, sedangkan sisanya sebesar 7,1% dipengaruhi oleh variabel selain RPP.

Berdasarkan persamaan regresi RPP terhadap BTD dapat dijelaskan bahwa variabel independen RPP memberikan pengaruh positif terhadap variabel BTD dengan koefisien sebesar 0,622. Hal ini berarti setiap kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp 100 Trilyun, maka Anggaran Belanja Transfer ke Daerah dalam APBN dapat meningkat sebesar Rp 62,2 Trilyun. Nilai signifikansi  $t = 0,000$  atau  $< 0,05$  pada uji  $t$  menunjukkan bahwa variabel RPP berpengaruh signifikan terhadap variabel BTD.

Model regresi III menguji hubungan variabel *independen* Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) terhadap variabel mediasi Program Anggaran Subsidi (PAS). Berdasarkan hasil uji statistik pada persamaan regresi yang menguji hubungan variabel RPP terhadap variabel PAS, diketahui nilai R sebesar 0,378 yang berarti hubungan kedua variabel bersifat lemah/rendah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,143 artinya variabel RPP hanya mampu memberikan pengaruh kontribusi sebesar 14,3% terhadap variabel PAS. Sedangkan variabel selain RPP memberikan pengaruh sebesar 85,7% terhadap perubahan variabel PAS. Hal ini bisa dijelaskan bahwa Anggaran Subsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat perlahan-lahan mulai dikurangi dan digantikan dengan Program Belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran. Misalkan pada tahun 2015, Pemerintah secara radikal mengurangi anggaran subsidi energi yang mengakibatkan Anggaran Subsidi secara nasional turun sebesar 52,6% dibandingkan dengan anggaran tahun 2014. Sehingga perubahan penerimaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan Anggaran Subsidi, hal ini terlihat dari nilai signifikansi  $t = 0,252$  atau  $> 0,05$ .

Model regresi IV menguji hubungan antara variabel mediasi Belanja Transfer ke Daerah (BTD) terhadap variabel *dependen* PDBP dan AKM. Berdasarkan hasil uji statistik, nilai R untuk model regresi BTD terhadap PDBP adalah 0,964, sedangkan nilai R untuk model regresi BTD terhadap AKM adalah 0,943. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model tersebut menunjukkan hubungan antar variabel yang sangat kuat. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada model regresi BTD terhadap PDBP sebesar 0,929 yang menunjukkan bahwa variabel BTD mampu memberikan pengaruh kontribusi sebesar 92,9%, sedangkan variabel selain BTD hanya memberikan pengaruh sebesar 7,1% terhadap variabel PDBP. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada model regresi BTD terhadap AKM sebesar 0,890 yang artinya bahwa

variabel BTM mampu memberikan pengaruh kontribusi sebesar 89% terhadap variabel AKM, sedangkan variabel lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 11%.

Jika dilihat dari signifikansi pengaruh variabel BTM terhadap variabel dependen PDBP dan AKM, terlihat nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,000 atau  $< 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel mediasi BTM berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen PDBP dan AKM. Hasil ini sekaligus juga membuktikan bahwa variabel BTM memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel PDBP yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar  $6,752E^{-8}$  serta berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel AKM yang ditunjukkan dengan nilai koefisien (minus)  $6,762E^{-14}$ .

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian (Arini, Mustika M, 2015) yang menunjukkan hasil bahwa PAD memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi serta hasil penelitian (Lisna et al., 2013) yang menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil mempercepat pengentasan kemiskinan.

Model regresi V menguji hubungan variabel mediasi Program Anggaran Subsidi (PAS) terhadap variabel dependen PDBP dan AKM. Seperti pada model I dan IV, variabel PDBP dan variabel AKM merupakan indikator kemakmuran rakyat. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai R untuk kedua model regresi adalah sebesar 0,630 untuk model regresi PAS terhadap PDBP dan 0,273 untuk model regresi PAS terhadap AKM. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel PAS terhadap PDBP termasuk dalam kategori hubungan sedang, sedangkan hubungan variabel PAS terhadap AKM termasuk dalam kategori rendah/lemah.

Sementara itu nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,397 pada model regresi PAS terhadap PDBP menunjukkan bahwa variabel PAS hanya memberikan pengaruh kontribusi sebesar 39,7% terhadap PDBP, sedangkan sisanya sebesar 60,3% dipengaruhi oleh variabel selain PAS. Pada model regresi PAS terhadap AKM, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,074 yang menunjukkan bahwa variabel PAS hanya memberikan pengaruh kontribusi sebesar 7,4% terhadap AKM, sedangkan variabel selain PAS dapat memberikan pengaruh sebesar 92,6%.

Variabel PAS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDBP karena nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,038 atau  $< 0,05$ , sedangkan pengaruh variabel PAS terhadap variabel AKM tidak signifikan karena nilai signifikansinya sebesar 0,417 atau  $> 0,05$ . Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel mediasi PAS hanya berpengaruh signifikan negatif pada variabel PDBP yang ditunjukkan dengan koefisien sebesar (minus)  $9,077E^{-8}$ , serta tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel AKM.

Model regresi VI menguji hubungan variabel independen Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) terhadap variabel dependen PDBP dan AKM dengan melibatkan variabel mediasi Belanja Transfer ke Daerah (BTD). Berdasarkan hasil uji statistik pada model regresi RPP terhadap PDBP dengan melibatkan

variabel mediasi BTD, nilai R diketahui sebesar 0,966. Sementara itu model regresi RPP terhadap AKM dengan melibatkan variabel mediasi BTD, nilai R diketahui sebesar 0,985. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model regresi tersebut memiliki hubungan sangat kuat. Sementara itu nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,932 dan 0,971. Hal ini berarti bahwa variabel RPP bersama variabel mediasi BTD memberikan pengaruh kontribusi sebesar 93,2% pada variabel independen PDBP dan 97,1% pada variabel independen AKM.

Apabila dilihat dari persamaan regresi hubungan variabel independen RPP dan variabel mediasi BTD terhadap variabel dependen PDBP, diketahui bahwa variabel RPP dan variabel BTD memberikan pengaruh positif masing-masing sebesar  $1,041E^{-8}$  dan  $5,196E^{-8}$ . Akan tetapi signifikansi hubungan variabel RPP dan variabel BTD tidak signifikan, karena nilai sig. pada uji t diketahui sebesar 0,523 dan 0,064 atau  $> 0,05$ . Berdasarkan persamaan regresi antara variabel independen RPP dan variabel mediasi BTD terhadap variabel dependen AKM, diketahui bahwa variabel RPP memberikan pengaruh negatif sedangkan variabel BTD memberikan pengaruh positif terhadap variabel AKM. Signifikansi pengaruh variabel RPP terhadap variabel AKM sebesar 0,002 atau  $< 0,05$  yang menunjukkan berpengaruh signifikan. Sebaliknya pengaruh variabel mediasi BTD terhadap variabel AKM menunjukkan angka signifikansi 0,731 atau  $> 0,05$  yang menunjukkan tidak berpengaruh signifikan.

Hasil pengujian statistik model VI menunjukkan bahwa hubungan variabel independen RPP terhadap variabel dependen PDBP dan AKM dengan mediasi variabel BTD tidak berpengaruh secara signifikan.

Model regresi VII menguji hubungan variabel independen Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) terhadap variabel dependen PDBP dan AKM dengan melibatkan variabel mediasi Program Anggaran Subsidi (PAS). Berdasarkan hasil uji statistik pada model regresi hubungan variabel RPP terhadap PDBP dengan variabel PAS sebagai variabel mediasi, diketahui nilai R sebesar 0,990. Sedangkan pada model regresi RPP terhadap AKM dengan variabel PAS sebagai variabel mediasi, diketahui nilai R sebesar 0,991. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel pada kedua model regresi tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), pada kedua model tersebut menunjukkan angka 0,980 dan 0,983. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen RPP dan variabel mediasi PAS memberikan pengaruh kontribusi sebesar 98% terhadap variabel dependen PDBP. Sedangkan pada model regresi antara variabel dependen RPP dan variabel mediasi PAS memberikan pengaruh kontribusi sebesar 98,3% terhadap variabel dependen AKM.

Pada persamaan regresi variabel RPP terhadap PDBP dengan mediasi variabel PAS, diketahui variabel RPP memberikan pengaruh positif terhadap variabel PDBP. Demikian pula dengan variabel mediasi PAS memberikan pengaruh positif terhadap variabel PDBP. Berdasarkan signifikansinya, variabel RPP dan

variabel PAS memberikan pengaruh signifikan karena nilai sig. = 0,000 atau  $< 0,05$ .

Pada persamaan regresi variabel RPP terhadap AKM dengan mediasi variabel PAS, diketahui variabel RPP memberikan pengaruh negatif terhadap variabel AKM, demikian juga variabel PAS memberikan pengaruh negatif terhadap variabel PAS. Berdasarkan signifikansinya, variabel RPP dan variabel PAS berpengaruh secara signifikan karena nilai sig. masing-masing sebesar 0,000 dan 0,041 atau  $< 0,05$ . Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan variabel RPP yang dimediasi oleh variabel PAS berpengaruh secara signifikan terhadap variabel AKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terhadap model I sampai VII, terlihat bahwa variabel *independen* RPP berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen* PDBP dan AKM (hubungan langsung tanpa melibatkan variabel mediasi). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel RPP berpengaruh signifikan positif terhadap variabel PDBP dan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel AKM yang ditunjukkan melalui koefisien dalam persamaan regresi. Hasil ini membuktikan bahwa Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemakmuran rakyat yang ditandai dengan pengaruh positif pada PDBP dan pengaruh negatif pada AKM secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vatavu yang menyatakan bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan (*welfare*) penduduk sebuah negara (Vatavu et al., 2019).

Pada model regresi yang melibatkan variabel mediasi LTD dan PAS, diketahui bahwa model regresi yang melibatkan variabel LTD tidak berpengaruh signifikan, sebaliknya pada model yang melibatkan variabel PAS berpengaruh signifikan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa variabel LTD merupakan variabel mediasi sempurna (*complete mediation*). Karena pada model langsung antara variabel RPP terhadap variabel LTD (Model II) dan antara variabel LTD terhadap variabel KR (Model IV) berpengaruh secara signifikan, sementara itu pada model tidak langsung yang melibatkan variabel mediasi LTD yang menghubungkan variabel RPP dengan variabel PDBP dan AKM (Model VI) tidak berpengaruh secara signifikan.

Sementara itu variabel PAS bukan merupakan variabel mediasi antara variabel RPP dengan variabel PDBP dan AKM. Hal ini disebabkan karena pada model regresi langsung antara variabel RPP terhadap variabel PAS (Model III) serta model regresi antara variabel PAS terhadap variabel KR (V) tidak berpengaruh secara signifikan (Solimun & Fernandes, 2017).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian pada model regresi I dapat diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak (RPP) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan yang diukur dari

hubungan RPP yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Perkapita dan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia sepanjang periode 2010-2020.

Hasil pengujian pada model regresi II menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Transfer ke Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penerimaan pajak, Pemerintah Pusat akan meningkatkan Anggaran Belanja Transfer ke Daerah. Dengan meningkatnya Anggaran Belanja Transfer ke Daerah dalam APBN, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian terhadap model regresi IV yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Belanja Transfer ke Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan yang merupakan indikator dari kemakmuran rakyat. Pada model regresi VI diperoleh hasil bahwa hubungan variabel RPP dengan variabel PDBP dan AKM dengan melibatkan variabel mediasi LTD diperoleh hasil tidak signifikan, Hasil ini membuktikan bahwa Program Belanja Transfer ke Daerah merupakan variabel mediasi sempurna (*complete mediation*) antara variabel Realisasi Penerimaan Pajak dengan variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan.

Hasil pengujian model regresi III menunjukkan bahwa variabel Realisasi Penerimaan Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Program Anggaran Subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam APBN. Demikian pula Program Anggaran Subsidi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kemakmuran Rakyat. Hal ini dapat dijelaskan karena Program Anggaran Subsidi pada dasarnya dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin yang terdampak langsung akibat kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah, agar masyarakat miskin masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu Program Subsidi yang diberikan Pemerintah melalui APBN tidak hanya dinikmati masyarakat miskin, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat yang kaya (Subsidi energi). Oleh karena itu Pemerintah mulai merubah skema pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari Pemerintah.

Hasil pengujian ini membuktikan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak yang cenderung meningkat tidak memberikan dampak secara langsung terhadap Anggaran Subsidi dalam APBN. Hasil pengujian model III dan V yang tidak berpengaruh secara signifikan membuktikan bahwa Program Anggaran Subsidi bukan merupakan variabel mediasi antara Realisasi Penerimaan Pajak dengan Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menggunakan indikator variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan untuk mengukur variabel Kemakmuran Rakyat. Apabila digunakan variabel lain misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemerataan Pembangunan, dll ada kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Adkisson, R. V., & Mohammed, M. (2014). Tax structure and state economic growth during the great recession. *Social Science Journal*, 51(1). <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.009>
- Arini, Mustika M, 2015. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2007-2013 Arini 1 Made Dwi Setyadi Mustika. *E-Jurnal EP Unud*.
- Badan Pusat Statistik. (2020a). Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020. *Katalog*, 4102004.64, 37–39.
- Badan Pusat Statistik. (2020b). Statistik Indonesia 2020 Statistical Yearbook of Indonesia 2020. *Statistical Yearbook of Indonesia*, April.
- Budiantoro, S. (2020). *Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan*. Perkumpulan Prakarsa. <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/661-subsidi-dalam-penguatan-kebijakan-fiskal-5cc3b3a5.pdf>
- FAHMI, A. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan Dan Kesehatan, Dan PDRB Perkapita Terhadap IPM. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jmkp.v2i1.285>
- Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- KBBI. (2020). Arti kata sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. In *KBBI Online*.
- Kemenkeu. (2015). Budget In Brief APBN 2015. *Kementrian Keuangan RI*.
- Kementerian Keuangan RI, 020. (2020). Pokok-pokok APBN 2020. In *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.433>
- Malik, A. (2018, April 1). *Benarkah Pertumbuhan Ekonomi Menunjukkan Kesejahteraan Masyarakat ?* [https://kumparan.com/asmiati\\_malik/benarkah-pertumbuhan-ekonomi-menunjukkan-kesejahteraan-masyarakat-21dM5TYyqc/3](https://kumparan.com/asmiati_malik/benarkah-pertumbuhan-ekonomi-menunjukkan-kesejahteraan-masyarakat-21dM5TYyqc/3)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. In Penerbit Andi.
- Ministry of Finance, R. of I. (2016). Informasi APBN 2016 (in Indonesian). *Informasi APBN 2016*, 50.
- Ramadhan, H., & Mariyanti, T. (2013). Pengaruh Pajak, Subsidi Dan ZIS Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 22(2). <https://doi.org/10.25105/me.v22i2.3170>
- Santoso, S. (2019). Statistik Parametrik. *Statmat : Jurnal Statistika Dan Matematika*, May.
- Saparini, H. (2010). *Kajian Subsidi dan alokasinya di APBN 2010.pdf*.
- Saputra; Bambang, & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2), 185–199.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1). <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Sofi, I. (2020). Memahami Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. *Www.Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/memahami-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa/>
- Solimun, & Fernandes, A. A. R. (2017). Investigation the mediating variable: What is necessary? (case study in management research). *International Journal of Law and Management*, 59(6). <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2016-0077>
- UU KUP, 2007. (2007). Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jakarta: Sekertariat Negara*.
- Vatavu, S., Lobont, O. R., Stefea, P., & Brindescu-Olariu, D. (2019). How taxes relate to potential welfare gain and appreciable economic growth. *Sustainability (Switzerland)*, 11(15). <https://doi.org/10.3390/su11154094>
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5737>

